

## Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 Dalam Tata Kelola Parkir Berbasis Qris di Taman Bungkul Kota Surabaya

Christine Mega Prihartini Laia<sup>1)</sup>, Sapto Pramono<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: [Christinelai208@gmail.com](mailto:Christinelai208@gmail.com)

### ABSTRAK

Implementasi kebijakan digitalisasi dalam tata kelola parkir semakin berkembang, termasuk penerapan sistem pembayaran non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 dalam sistem parkir berbasis QRIS di Taman Bungkul, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi faktor dominan dan tidak dominan yang mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem parkir berbasis QRIS di Taman Bungkul berjalan dengan cukup baik. Faktor dominan yang mendukung keberhasilan implementasi ini meliputi kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi digital, dukungan dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang telah menggunakan QRIS, serta kesiapan juru parkir dalam mengoperasikan sistem pembayaran digital. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan akses teknologi bagi sebagian masyarakat, ketidaksiapan sebagian juru parkir dalam mengelola transaksi digital, serta kendala teknis seperti gangguan jaringan dan kerusakan kode QR. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, disarankan adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan bagi juru parkir, serta penguatan infrastruktur teknologi guna memastikan kelancaran sistem pembayaran parkir berbasis QRIS.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Parkir Digital, QRIS, Perda No.3 Tahun 2018, Taman Bungkul

### Abstract

*The implementation of digitalization policies in parking management continues to develop, including the adoption of cashless payment systems using the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No.3 of 2018 in the QRIS-based parking system at Taman Bungkul, Surabaya. A qualitative descriptive approach was used to identify the dominant and non-dominant factors influencing the success of this system. The findings indicate that the implementation of the QRIS-based parking system at Taman Bungkul has been relatively successful. The dominant factors supporting its success include the public's readiness to adapt to digital technology, support from small and medium enterprises (SMEs) that have already adopted QRIS, and the preparedness of parking attendants to operate the digital payment system. However, several obstacles were identified, such as limited access to technology for certain groups, the lack of readiness among some parking attendants to manage digital transactions, and technical issues such as network disruptions and damaged QR codes. To enhance the effectiveness of this policy implementation, it is recommended to increase public awareness through socialization, provide training for parking attendants, and strengthen technological infrastructure to ensure the smooth operation of the QRIS-based parking payment system.*

**Keywords:** Policy Implementation, Digital Parking, QRIS, Regional Regulation No.3 of 2018, Taman Bungkul

## **A. LATAR BELAKANG**

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan publik seperti pengelolaan parkir. Kemajuan teknologi mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai yang lebih praktis dan aman, menggantikan transaksi tunai yang berisiko terhadap kriminalitas dan kebocoran pendapatan daerah. Digitalisasi ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari.

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia, khususnya di kota besar seperti Surabaya, menuntut adanya sistem parkir yang lebih efisien. Rata-rata pertumbuhan kendaraan di Surabaya mencapai 6,4% per tahun, dengan jumlah kendaraan tertinggi di Jawa Timur. Kepadatan lalu lintas dan keterbatasan lahan parkir membuat sistem pembayaran yang cepat dan sederhana menjadi kebutuhan, terutama di kawasan ramai seperti taman kota dan pusat perbelanjaan.

Di berbagai kota besar, metode pembayaran parkir non-tunai telah diterapkan menggunakan mesin EDC, e-money, hingga aplikasi digital seperti OVO, GoPay, dan Dana. Namun, masing-masing metode memiliki tantangan, seperti ketergantungan pada jaringan internet atau keterbatasan saldo. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran yang lebih terintegrasi dan fleksibel.

Penggunaan QRIS memungkinkan pembayaran parkir hanya dengan memindai satu kode QR melalui berbagai aplikasi keuangan. Sistem ini mendukung tren digitalisasi di Indonesia, di mana pengguna internet telah mencapai 202 juta orang pada tahun 2023. Dengan tingginya penetrasi internet, terutama di Jawa Timur yang mencapai 75,5%, implementasi QRIS dalam sistem parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi.

Pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan telah menerapkan sistem pembayaran QRIS di Taman Bungkul sebagai upaya optimalisasi retribusi parkir. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang pencegahan korupsi dan Perda No. 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan parkir.

Keunggulan sistem QRIS terletak pada kemudahan transaksi tanpa perlu alat tambahan selain smartphone. Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, sistem ini menjadi solusi praktis bagi pengguna jasa parkir serta membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan parkir. Selain itu, QRIS berkontribusi dalam mendorong masyarakat menuju cashless society, yang lebih aman dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 dalam tata kelola parkir berbasis QRIS di Taman Bungkul, Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan parkir, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mendukung transformasi digital di sektor transportasi.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Teori Implementasi**

Teori implementasi kebijakan publik berfokus pada bagaimana suatu kebijakan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan dan konteks penerapannya, termasuk dukungan masyarakat, kapasitas lembaga, serta sumber daya yang tersedia. Dalam konteks parkir berbasis QRIS di Taman Bungkul, aktor-aktor utama seperti pemerintah kota Surabaya, pengguna jasa parkir, dan penyedia layanan QRIS memiliki peran krusial dalam

menentukan efektivitas kebijakan ini. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi, seperti konektivitas internet yang stabil dan aplikasi yang mudah digunakan, juga menjadi faktor penentu keberhasilan sistem ini. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta petugas parkir perlu dilakukan agar sistem dapat berjalan optimal.

Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan ini sangat diperlukan untuk menilai efektivitas dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Mazmanian dan Sabatier (1989) mengidentifikasi tiga faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu kondisi kebijakan, kemampuan organisasi, dan dukungan politik. Dalam kasus parkir berbasis QRIS, regulasi yang jelas, kapasitas pemerintah dalam mengelola sistem, serta komitmen pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilannya. Mekanisme umpan balik dari pengguna dan pelaksana juga penting untuk mengidentifikasi kendala yang muncul, sehingga pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan pendekatan yang adaptif, kebijakan ini tidak hanya dapat diimplementasikan secara efektif, tetapi juga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **2. Teori Implementasi Edward III**

Teori implementasi Edward III, atau Model Implementasi Kebijakan Edward III, merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan penerapan kebijakan publik. Model ini menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses pelaksanaannya. Edward III mengembangkan teori ini pada akhir 1970-an dan awal 1980-an sebagai respon terhadap kompleksitas dalam menerapkan kebijakan publik secara efektif. Implementasi bukan sekadar menjalankan rencana yang telah ditetapkan,

melainkan juga melibatkan penyesuaian di lapangan yang sering kali berbeda dari perencanaan awal. Oleh karena itu, keterbukaan dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan menjadi elemen penting dalam model ini.

## **3. Pengertian QRIS**

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah sistem pembayaran non-tunai yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran digital dalam satu standar. Dengan hanya memindai kode QR, pengguna dapat melakukan transaksi tanpa harus memperhatikan aplikasi pembayaran yang digunakan, seperti OVO, GoPay, atau DANA. Keunggulan utama QRIS adalah kemudahan dan efisiensinya, di mana transaksi dapat dilakukan dengan cepat hanya melalui smartphone, mengurangi ketergantungan pada uang tunai atau kartu fisik. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan keamanan dengan meminimalkan risiko kehilangan atau pencurian uang tunai dalam transaksi sehari-hari.

Di sisi lain, implementasi QRIS juga memberikan manfaat besar bagi perekonomian, khususnya bagi UMKM yang kini dapat mengakses metode pembayaran modern tanpa perlu investasi besar. Dengan menerima pembayaran digital, UMKM dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Namun, ada tantangan yang masih perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan QRIS serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi dari pemerintah maupun penyedia layanan sangat penting untuk memastikan adopsi QRIS yang lebih luas dan efektif, termasuk dalam sektor layanan publik seperti sistem parkir berbasis QRIS di berbagai kota.

#### **4. Regulasi Perparkiran di Indonesia**

Regulasi dan kebijakan perparkiran di Indonesia berperan penting dalam pengelolaan ruang publik, transportasi, dan peningkatan pendapatan daerah. Berbagai aturan, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan peraturan daerah, telah diterbitkan untuk menciptakan sistem parkir yang lebih terstruktur dan efisien. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah mulai mengadopsi sistem digital seperti QRIS dan aplikasi pencarian parkir guna meningkatkan transparansi dan kenyamanan pengguna. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran parkir. Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian, dengan penyediaan area parkir ramah lingkungan dan integrasi dengan transportasi umum untuk mengurangi emisi karbon. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, serta edukasi dan pelatihan bagi petugas dan pengguna parkir agar sistem yang diterapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

#### **5. Digitalisasi Dalam Sistem Perparkiran**

Digitalisasi dalam sistem perparkiran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi pengguna melalui penerapan teknologi seperti QRIS, aplikasi parkir digital, e-ticketing, serta sensor berbasis IoT. QRIS memungkinkan transaksi non-tunai yang lebih cepat dan aman, sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan parkir daerah. Sementara itu, aplikasi parkir digital dan sistem e-ticketing membantu pengguna dalam mencari tempat parkir serta mempercepat proses pembayaran. Teknologi sensor dan IoT juga mempermudah pengelolaan lahan parkir dengan memberikan

informasi real-time mengenai ketersediaan tempat. Namun, tantangan dalam implementasi digitalisasi ini masih cukup besar, termasuk keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan penyedia layanan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas serta penguatan regulasi guna memastikan sistem parkir berbasis teknologi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

#### **6. Implementasi Pembayaran Non Tunai Dalam Layanan Publik**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran dalam layanan publik, salah satunya melalui penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi. Sistem pembayaran non-tunai ini mengurangi ketergantungan pada uang fisik, menekan risiko kebocoran pendapatan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Implementasinya telah diterapkan di berbagai sektor, seperti perparkiran, transportasi umum, dan retribusi daerah, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan resistensi masyarakat terhadap metode pembayaran baru masih menjadi kendala. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini memerlukan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, serta edukasi yang berkelanjutan agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam layanan publik.

### **C. METODE**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 dalam tata kelola parkir berbasis QRIS di Taman Bungkul, Kota Surabaya.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial di lapangan serta memahami dinamika kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial tertentu. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan parkir berbasis QRIS, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

## 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 dalam tata kelola parkir berbasis QRIS di Taman Bungkul, Kota Surabaya, dengan menyoroti komunikasi antara Pemerintah Kota Surabaya, pengelola Taman Bungkul, petugas parkir, dan masyarakat pengguna parkir. Mengacu pada teori implementasi Edward III, penelitian ini menganalisis empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi. Keempat faktor ini berperan dalam memastikan efektivitas implementasi, mulai dari pemahaman kebijakan oleh para pemangku kepentingan hingga kesiapan teknis dan koordinasi antar lembaga. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah guna mengoptimalkan sistem parkir berbasis QRIS agar lebih efisien dan berkelanjutan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Taman Bungkul, yang terletak di pusat Kota Surabaya. Taman ini merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang populer di kalangan masyarakat Surabaya, tidak hanya sebagai tempat rekreasi tetapi juga sebagai lokasi berbagai kegiatan sosial dan budaya. Dengan

banyaknya pengunjung yang datang, kebutuhan akan sistem parkir yang efisien dan terintegrasi menjadi sangat penting. Taman Bungkul juga telah menerapkan sistem QRIS untuk memudahkan pembayaran parkir, sehingga menjadikannya lokasi yang ideal untuk penelitian ini.

Taman Bungkul memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang mencerminkan perkembangan kota Surabaya. Menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Taman Bungkul menerima lebih dari 1 juta pengunjung setiap tahunnya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, 2020). Dengan jumlah pengunjung yang tinggi, tantangan dalam pengelolaan parkir menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana sistem QRIS diimplementasikan dan diterima oleh pengunjung taman.

Selain itu, lokasi penelitian ini juga dipilih karena adanya kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Pemerintah Kota Surabaya telah berkomitmen untuk menerapkan sistem pembayaran digital dalam berbagai aspek pelayanan, termasuk parkir. Hal ini sejalan dengan program *Smart City* yang dicanangkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kota (Laili Dwi Agustina et al., 2023).

Data demografis pengunjung Taman Bungkul juga akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan beragam latar belakang, seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi, penting untuk memahami bagaimana berbagai kelompok masyarakat berinteraksi dengan sistem parkir berbasis QRIS. Penelitian ini akan mengumpulkan data tentang karakteristik pengunjung dan pola penggunaan parkir untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas sistem yang diterapkan.

Dengan memilih Taman Bungkul sebagai lokasi penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan insight yang relevan dan aplikatif bagi pengelolaan parkir berbasis QRIS di kota-kota lain di Indonesia.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Implementasi Pembayaran Parkir Non Tunai QRIS di Taman Bungkul Oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Menurut Teori Edward III berfokus pada empat indikator utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi terhadap setiap indikator dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi QRIS di Taman Bungkul sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara UPTD Tepi Jalan Umum, pengawas parkir, juru parkir, dan masyarakat. Sosialisasi yang baik membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih mudah menerima sistem ini. Evaluasi rutin dan pengawasan ketat juga membantu mencegah kecurangan. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum terbiasa dengan pembayaran digital serta kendala teknis seperti gangguan sinyal atau kesalahan kode QR.

Keberhasilan implementasi QRIS di Taman Bungkul sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara UPTD Tepi Jalan Umum, pengawas parkir, juru parkir, dan masyarakat. Sosialisasi yang baik membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih mudah menerima sistem ini. Evaluasi rutin dan pengawasan ketat juga membantu mencegah kecurangan. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum terbiasa

dengan pembayaran digital serta kendala teknis seperti gangguan sinyal atau kesalahan kode QR.

#### 2. Sumber Daya

Dukungan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung telah dipersiapkan dengan baik, termasuk pengaturan *shift* juru parkir dan ketersediaan titik kode QR untuk roda dua dan roda empat. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti kode QR yang rusak dan perlunya standarisasi atribut petugas parkir untuk meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem QRIS.

#### 3. Disposisi

Disposisi positif dari pengelola, pengawas, juru parkir, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sistem QRIS. Pengelola UPTD proaktif dalam mensosialisasikan kebijakan ini, sementara pengawas parkir melihat QRIS sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pengawasan. Juru parkir yang awalnya ragu kini menyadari manfaat sistem ini, dan mayoritas pengguna merasa terbantu dengan proses transaksi yang lebih praktis.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas memungkinkan implementasi QRIS berjalan lancar. Kebijakan ini merupakan inisiatif Wali Kota Surabaya untuk mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. UPTD Parkir bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem, dengan koordinasi yang baik antara pengelola, pengawas, dan juru parkir. Implementasi QRIS terbukti meningkatkan transparansi dan potensi peningkatan PAD.

### 2. Faktor Dominan dan Tidak Dominan dalam Mempengaruhi Implementasi Sistem Parkir Berbasis QRIS di Taman Bungkul

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem parkir berbasis QRIS di Taman Bungkul, digunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang mencakup empat aspek utama:

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor ini memiliki tingkat pengaruh yang berbeda dalam proses implementasi kebijakan :

1. Faktor Dominan

Faktor dominan meliputi komunikasi dan struktur birokrasi. Sosialisasi yang intensif dari pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan pengelola parkir melalui berbagai media membantu masyarakat memahami sistem QRIS, sehingga mempermudah proses transisi ke pembayaran digital. Selain itu, keberadaan regulasi dalam Perda No.3 Tahun 2018 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menegakkan aturan terkait sistem parkir digital, sementara pengelolaan yang jelas di bawah Dinas Perhubungan memastikan implementasi berjalan lebih efektif.

2. Faktor Tidak Dominan

Faktor yang kurang berpengaruh dalam implementasi adalah sumber daya dan disposisi. Keterbatasan perangkat QR code serta kurangnya pemahaman teknis di kalangan juru parkir menjadi tantangan yang perlu diatasi. Selain itu, masih terdapat resistensi dari beberapa juru parkir yang terbiasa dengan sistem tunai serta kesulitan pengguna dalam beradaptasi dengan metode pembayaran digital. Dengan demikian, komunikasi dan struktur birokrasi menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan implementasi QRIS, sementara keterbatasan sumber daya dan sikap pelaksana masih menjadi hambatan dalam proses penerapannya.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa implementasi pembayaran non tunai QRIS di Taman Bungkul oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

### **a). Implementasi pembayaran parkir non tunai QRIS di Taman Bungkul Kota Surabaya**

Implementasi pembayaran parkir non tunai QRIS di Taman Bungkul Kota Surabaya oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum menunjukkan perkembangan yang positif, didukung oleh adaptasi masyarakat yang semakin terbiasa dengan teknologi digital. Penerapan sistem ini memanfaatkan kemajuan zaman yang mengarah ke digitalisasi, di mana penggunaan QRIS menjadi pilihan yang lebih praktis dan efisien bagi pengunjung dan pengelola parkir. Selain itu, sebagian besar UMKM yang ada di sekitar Taman Bungkul telah menerapkan QRIS, menjadikan penerapan sistem ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Fasilitas dan kesiapan SDM, seperti juru parkir yang telah beradaptasi dengan sistem ini, turut mendukung kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Penggunaan QRIS juga diakui lebih transparan, efisien, dan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna parkir.

### **b). Faktor yang Dominan dan Tidak Dominan dalam Mempengaruhi Implementasi Sistem Parkir Berbasis QRIS di Taman Bungkul**

Penerapan parkir berbasis QRIS di Taman Bungkul Kota Surabaya menghadapi sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Faktor pendukung utama yang ditemukan antara lain kesiapan masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi pembayaran digital, dukungan dari UMKM yang sudah menggunakan QRIS, serta adaptasi juru parkir terhadap teknologi tersebut. Selain itu, pengguna parkir yang terbiasa dengan pembayaran digital juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi.

Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan mencakup keterbatasan dalam akses teknologi bagi sebagian masyarakat, tidak siap beberapa juru parkir dalam mengelola transaksi digital, serta masalah teknis seperti gangguan sinyal dan kerusakan kode QR yang menghambat kelancaran sistem. Untuk

mencapai keberhasilan yang optimal, perlu adanya komunikasi yang lebih baik, peningkatan SDM, serta penguatan fasilitas dan teknologi yang mendukung sistem pembayaran QRIS.

## **2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran terkait penerapan sistem pembayaran parkir non tunai QRIS di Taman Bungkul Kota Surabaya oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

Pemerintah daerah dan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat dan cara penggunaan QRIS dalam sistem parkir. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, papan informasi di lokasi parkir, atau kegiatan sosialisasi langsung agar lebih banyak masyarakat memahami dan menggunakan sistem ini.

### **2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pelatihan rutin bagi juru parkir perlu dilakukan agar mereka lebih terampil dalam mengelola sistem pembayaran digital. Hal ini penting untuk mengurangi kendala yang muncul akibat tidak siap juru parkir dalam mengoperasikan QRIS.

### **3. Penguatan Infrastruktur Teknologi**

Pemerintah dan pengelola parkir perlu memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat pemindaian QR yang berfungsi dengan baik. Selain itu, perlu ada langkah antisipasi untuk mengatasi gangguan teknis, misalnya dengan menyediakan alternatif sistem pencatatan manual sementara saat terjadi kendala.

### **4. Meningkatkan Kepercayaan dan Kenyamanan Pengguna**

Transparansi dalam pengelolaan parkir harus tetap dijaga agar pengguna merasa lebih aman dan nyaman menggunakan QRIS. Pemerintah dapat mengembangkan aplikasi

pelaporan atau umpan balik dari masyarakat untuk menampung keluhan dan saran terkait implementasi sistem parkir berbasis QRIS.

### **5. Kolaborasi dengan UMKM dan Pihak Swasta**

Mengingat UMKM di sekitar Taman Bungkul telah banyak menggunakan QRIS, kolaborasi lebih lanjut dengan pelaku usaha ini dapat meningkatkan ekosistem digital secara menyeluruh. Program insentif atau promo parkir dengan QRIS juga bisa menjadi strategi untuk mendorong lebih banyak pengguna beralih ke sistem non tunai.

## REFERENSI

- BPS, J. (2023). Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/id>
- BPS, J. (2025). No Title. <https://www.bps.go.id/id>
- Dewi, L. S. (2020). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Dishub. (2022). Dinas Perhubungan Surabaya. <https://dishub.surabaya.go.id/portal/>
- E.R.I. (2023). JUMLAH DATA KENDARAAN POLDA JAWA TIMUR. [https://www-ceicdata-com.translate.goog/en/indicator/indonesia/number-of-registered-vehicles?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Indonesia](https://www-ceicdata-com.translate.goog/en/indicator/indonesia/number-of-registered-vehicles?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Indonesia)
- Number of Registered Vehicles was reported at 24%2C646%2C825 Unit,to 2023%2C with 61 observati
- Edward, C. M. (1980). Implementing Public Policy.
- Fauzi, M. F., Nurcholis, T., Kuswanto, J., Abdulloh, F. F., & Amrulloh, Y. A. (2022). Inovasi Sistem Pembayaran E-Parkir Cashless Dengan Teknologi Hybrid Payment System Berbasis QRIS. *Jurnal Infomedia*, 7(2), 77. <https://doi.org/10.30811/jim.v7i2.3392>
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World.
- Hank C. Jenkins-Smith, Daniel Nohrstedt, Christopher M. Weible, K. I. (2018). The Advocacy Coalition Framework: An Overview of the Research Program.
- Instagram. (2023). kelurahan kupang krajan. [https://www.instagram.com/kelurahankupang\\_gkrajan/reel/DAhksK-Tn21/](https://www.instagram.com/kelurahankupang_gkrajan/reel/DAhksK-Tn21/)
- Jenkins-Smith, P. A. S. & H. C. (1993). The Advocacy Coalition Framework: An Overview.
- Karim, D. H. A. (2023). Manajemen Transportasi. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kominfo. (2023). kementerian komunikasi dan digital. <https://www.kominfo.go.id/>
- Laili Dwi Agustina, Nur Fitri Ana Melati, Febian Ragil Prawesti, & Fierda Nurany. (2023). Smart City : Upaya Pembangunan Kota Surabaya. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(2), 98–112. <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i2.209>
- Lila Amelia Safitri, M., Alvin Avisena, M., Andi Tribuana, A., & Ramadhani Mega Nahda, A. W. (2024). Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Via QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Rangka Memberikan Kenyamanan Bagi Masyarakat di Kota Surabaya. *Journal Of Social Science Research*, 4, 13840–13854.
- LSI. (2023). Lembaga Survei Indonesia. <https://www.lsi.or.id/>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). Implementation and Public Policy.
- Putri, N. A., Gresita Putri, G. M., & Jamal, A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Pemerintah dalam Metode Pembayaran Non Tunai pada Proses Pembayaran Parkir di Kota Surabaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2484>
- Social, we are. (2023). digital 2023 Your ultimate guide to the evolving digital world. <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/>
- Sukanata, I. G. A. D. D. (2019). Efektifitas Pemberian Sanksi Label Security Checked Terhadap Pelanggar Parkir Kendaraan Roda Empat Di Bandara Ngurah Rai. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 50–61.
- Terbuka, R., Di, H., Makassar, K., & Suardi, W. (2020). Advocacy Coalition Framework Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis yang diatur dalam suatu peraturan dapat mempertimbangkan watak dan khas proses urbanisasi dan demikian perkotaan pimpinan tingkat maupun bawah akan merupakan

- aspek dinamis kedudukan (statu. 9(2), 146–154.
- Theodora Thessa Renata Putri, Sri Umiyati, & Budi Rianto. (2022). Efektivitas Program E-Parking dalam Pelayanan Publik di Taman Bungkul Surabaya. *Public Sphere Review*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.30649/psr.v1i1.20>
- Vipriyanti, S., & Meirinawati, M. (2021). Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. *Publika*, 227–240. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p227-240>
- Yuliawati, W., Suroso, & Devi Pramudiana, I. (2023). Efektivitas Pelayanan Suroboyo Bus Melalui Aplikasi Golek Bis (GOBIS) dalam Rangka E-Government (Studi Pada UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Dinas Perhubungan Surabaya). *Jurnal Mahasiswa Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), 173–178. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7157>